

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Iran Green Movement

Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat kerap memicu aksi protes yang terjadi di negara-negara, salah satunya di Iran. Gerakan Hijau Iran (*Iran Green Movement*) atau yang juga disebut dengan Musim Semi Persia merupakan salah satu bentuk aksi protes masyarakat Iran terhadap adanya klaim kecurangan dalam pemilihan umum Presiden pada tahun 2009. Aksi protes ini berlangsung pada bulan Juni tepatnya di Ibu Kota Iran yakni Kota Teheran yang melibatkan banyak pihak dari berbagai macam lapisan maupun kelas masyarakat, menyebar ke seluruh penjuru dengan cepat, dan bertransformasi menjadi salah satu gerakan sosial-politik yang paling massif dan signifikan dalam sejarah kontemporer Iran (Ansari, 2012).

Pada tanggal 12 Juni 2009, kala itu Ahmadinejad terpilih kembali menjadi Presiden Iran periode 2009-2013 dengan perolehan suara sebanyak 62,6% yang mana lebih unggul dari saingannya Mir Hossein Mousavi dengan perolehan suara sebanyak 33,8%. Tidak terima dengan hasil tersebut karena dirasa ada kecurangan, Mir Hossein Mousavi tak segan-segan langsung menuntut hasil perolehan suara pemilihan umum Presiden 2009. Ditambah lagi dengan pihak pendukung Moussavi yang menuduh bahwa Dewan Wali tidak mendukung maupun memihak fraksinya terhadap

kecurangan dalam pemilihan umum, dan disinilah awal mula terbentuknya Gerakan Hijau / *Iran Green Movement*.

Berita kecurangan dalam pemilihan umum Presiden 2009 ini akhirnya terdengar ke seluruh penjuru Iran, yang membuat masyarakat Iran merasa kecewa dan geram dengan proses politik yang terjadi di Iran. Terlebih lagi, pemerintah Iran yang dulunya mengaku sebagai bagian dari masyarakat justru melakukan kecurangan sehingga membuat masyarakat kecewa. Menanggapi hal tersebut, *Iran Green Movement* berkembang pesat menjadi aksi protes rakyat berskala besar yang secara langsung menyerang taktik sosial politik kepemimpinan rezim Ahmadinejad.

Aksi protes besar-besaran mulai terjadi pada tanggal 15 Juni 2009 di Kota Teheran yang diikuti lebih dari dua juta jiwa penduduk Iran (Niakooee, 2020). Pada tanggal 19 Juni 2009 ketika sholat Jum'at, aksi protes ini semakin massif dikarenakan salah satu petinggi pemerintahan di Iran mendukung dan menyatakan bahwa pemilihan umum yang berlangsung tahun ini sah dan adil. Oleh karena itu, pihak dari Mousavi langsung turun ke jalan untuk menuntut hasil dari pemilihan umum yang dianggap tidak sah tersebut.

Dalam kericuhan yang terjadi, Moussavi tentunya dianggap sebagai dalang utama serta pemimpin dari aksi protes *Iran Green Movement*. Dinamakan *Iran Green Movement*, dikarenakan hijau merupakan symbol atau warna resmi dari fraksi Mir Hossein Mousavi. Namun setelah adanya klaim kecurangan dalam pemilihan umum Presiden 2009, warna hijau dianggap sebagai warna persatuan dan harapan untuk

masyarakat Iran yang kecewa dengan proses politik Iran. Oleh karena itu, para demonstran dan para pendukung fraksi Mousavi juga ikut menggunakan atribut serba hijau ketika berlangsungnya aksi protes.

Iran Green Movement 2009 dianggap sebagai salah satu peristiwa politik bersejarah dalam demokrasi Iran, bahkan peristiwa ini juga dianggap sebagai Revolusi Iran jilid dua. Namun, lambat-laun aksi protes yang bermula menuntut kecurangan dalam pemilihan umum Presiden berkembang menjadi sebuah kekuatan nasional dari masyarakat Iran yang menuntut hak-hak sipil yang awalnya tertera dalam Revolusi 1979. Awalnya aksi protes terhadap tuntutan mengenai hak sipil pernah berlangsung saat pemerintahan Ahmadinejad sebelumnya, namun karena Mousavi mengetahui hal tersebut sebagai suatu kelemahan dari pemerintahan Ahmadinejad maka beliau juga menyerukan kembali kepada publik yang kontra dengan Ahmadinejad untuk ikut serta dalam aksi *Iran Green Movement* agar mendapatkan kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan Ahmadinejad.

Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan Iran yang dirasa tidak pantas atau dirasa diskriminasi pada masa pemerintahan Ahmadinejad pun juga dijadikan sebagai bahan tuntutan dalam aksi *Iran Green Movement*. Pandangan dari para petinggi agama Iran, aksi protes *Iran Green Movement* dianggap sebagai sebuah ancaman yang berpotensi bagi rezim teokrasi karena mereka memusatkan kekuasaannya dengan menerapkan hukum-hukum syariah Islam kepada publik yang dinilai cukup ekstrem (Sundquist, 2013). Oleh karena itu, petinggi Iran menganggap hukum syariah Islam

lambat-laun akan tergulingkan dan digantikan dengan hukum lain yang bukan saran-saran dari mereka sehingga ada kemungkinan besar terjadi perdebatan antar petinggi agama dengan masyarakat yang akan membuat kondisi semakin memanas. Berikut adalah gambar bagaimana kondisi *Iran Green Movement* kala itu.

Gambar 2.1 Demonstran Menggunakan Atribut Serba Hijau Ketika *Iran Green Movement* 2009 Berlangsung



Sumber: Middle East Online, 2019 (MEO, 2019)

Berdasarkan gambar diatas tampak para demonstran menggunakan atribut serba hijau dan mulai memenuhi Kota Teheran untuk terlibat dalam aksi protes *Iran Green Movement* yang berujung ricuh. Kericuhan yang terjadi tidak hanya gempar di domestik, akan tetapi masyarakat Iran yang tinggal di luar negeri pun juga ikut berpartisipasi baik secara langsung di depan kantor kedutaan Iran maupun secara tidak langsung melalui *platform new media*. Pada sisi lainnya, *new media* memainkan

peran yang penting dalam *Iran Green Movement*. Kala itu pemerintah Iran memblokir seluruh akses ke internet dan layanan pada pesan teks *handphone*, bahkan 12 surat kabar ditutup terpaksa serta 100 jurnalis juga ikut ditangkap dalam waktu 6 bulan setelah pemilihan umum Presiden 2009 (Manso & Manso, 2013). Akibatnya, semakin hari jumlah demonstran yang ikut terjun dalam aksi protes pun semakin bertambah.

Awalnya aksi protes berjalan seperti biasa, namun pasukan keamanan dan kelompok paramiliter *Basij* tiba-tiba menyerang orang-orang yang turun dalam aksi *Iran Green Movement* dengan cara menangkap dan menggunakan alat-alat militer untuk membubarkan massa. Tindakan yang dilakukan pasukan keamanan dan *Basij* selama aksi berlangsung, menyebabkan sebanyak 36 jiwa penduduk Iran meninggal dunia, namun dari laporan para pendukung Mousavi menyatakan bahwa korban yang meninggal dunia ada sebanyak 72 jiwa (Manso & Manso, 2013).

Tidak hanya menelan korban jiwa, menurut beberapa laporan yang beredar bahwa sebanyak 500 orang juga ditangkap dan diamankan. Dalam 500 orang yang ditangkap tersebut, beberapa diantaranya adalah aktivis politik dan mahasiswa seperti mantan Menteri Luar Negeri Iran, Sekretaris Jendral Partai *Freedom Movement*, 18 orang pejabat partai *Freedom Movement*, Kepala Cabang Partai Tabriz, Pemimpin Partai *Server of Construction*, analis politik dan jurnalis Saaed Laylaz, beberapa anggota dari *Mojahedin of the Islamic Revolution Organization*, anggota dewan partai yang lain, dan aktivis mahasiswa dari berbagai universitas (Staff, 2009).

Akibat dari klaim kecurangan dalam pemilihan umum sehingga berujung dengan aksi protes yang rusuh tak hanya membuat antar petinggi politik dan petinggi agama di Iran saling berseteru. Namun dari hal ini, banyak muncul berbagai gerakan dari kalangan pemuda-pemudi Iran yang ikut andil dalam aksi *Iran Green Movement*. Terdapat 2 jaringan kaum muda-mudi Iran yang memainkan peran penting dan mendominasi dalam aksi Gerakan Hijau, pertama *Pouyeshe Mowje Sevvom* atau Kampanye Gelombang Ketiga yang merupakan jaringan bersifat independen yang menaruh dukungannya pada Khatami dan Mir Houssain Mousavi dengan 465.000 anggota lebih yang tergabung yang mana sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa.

Kedua, *Setade 88* yang berhasil mengorganisir sebanyak kurang lebih 5000 anggota muda yang aktif di seluruh dunia (Reisinezhad, 2015) Kedua jaringan ini merupakan asosiasi mahasiswa yang pro pada Mousavi, mereka pun diklaim berhasil dalam menyebarluaskan metode baru mengenai kampanye di Iran dan mengenalkan warna hijau ke dalam kampanye Mousavi. Mereka juga mengadakan pertemuan besar-besaran di Kota Teheran dan kota-kota lain di Iran. Akan tetapi, kedua jaringan ini akhirnya tidak bisa diorganisir karena para petingginya banyak yang ditangkap sehingga mereka disekritisasi oleh pemerintah Iran dan akhirnya kehilangan sentralitas dalam mengendalikan pasang-surut gerakan (Reisinezhad, 2015). Meski demikian, mereka tetap menemukan cara lain untuk mengatasi masalah tersebut

dengan menggunakan ruang virtual yang dianggap sebagai wadah baru yang bertransformasi menjadi sebuah alat yang bersifat revolusioner dan kritis.

Para pemuda Iran menjadikan ruang virtual tersebut sebagai sebuah sumber daya dan koneksi baru sehingga dapat meningkatkan aksi kolektif diseluruh wilayah baik yang ada di Iran maupun di luar Iran. Selain ikut menuntut tindakan kecurangan dalam pemilihan umum Presiden 2009, para pemuda ini juga menyerukan suara mereka dalam menuntut hak-hak sipil yang dirasa diskriminasi atau tidak pantas. Salah satu yang paling tersorot ialah hak-hak mengenai kesetaraan gender.

Pada masa pemerintahan Ahmadinejad kala itu, beliau mencetuskan berbagai kebijakan yang diklaim diskriminatif, seperti adanya hukum yang tumpang-tindih antar laki-laki dan perempuan, menyeru kaum perempuan untuk melakukan pekerjaan di rumah, dan menugaskan pasukan keamanan untuk memantau para perempuan maupun laki-laki di publik agar berpakaian sesuai standar syariah. Apabila melanggar kebijakan tersebut, maka akan ditangkap bahkan bisa dipenjarakan. Dalam aksi ini tercatat 150.000 orang yang ditangkap karena tidak menaati kebijakan tersebut (Shofiyah, 2019). Selain itu, pemerintahan Ahmadinejad dikenal kontra dengan hal-hal yang berbau dengan barat, sehingga televisi, film, radio, dan music pun juga dilarang digunakan di Iran.

Para pemuda Iran yang ikut terjun dalam *Iran Green Movement* memiliki ambisi untuk meningkatkan kebebasan politik dan sipil yang selaras dengan nilai-nilai yang diusung pada Revolusi 1979 yang berisi tentang jaminan Hak Asasi

Manusia yang berdasarkan kebebasan politik dan sosial sesuai dengan kerangka hukum sekaligus mendorong partisipasi masyarakat Iran dalam menentukan budaya, sosial, ekonomi, maupun politik (Sundquist, 2013). Tidak hanya itu, para perempuan dari berbagai latar belakang yang berbeda juga ikut berpartisipasi dalam proses politik maupun perjuangan demi melawan kondisi sosial politik yang cenderung bersifat menyimpang seperti korupsi, intimidasi, dan penyiksaan berkedok syariah (Sadeghi, 2010).

Selain itu, banyak perempuan yang menggunakan cadar juga ikut berpartisipasi dalam *Iran Green Movement*, meskipun sebagian besar dari mereka dikatakan tidak pantas untuk ikut serta bahkan banyak media internasional menyorot aksi tersebut, namun mereka tetap ikut terjun langsung ke lapangan. Meskipun adanya kebijakan dan doktrin seperti itu semakin mendorong para perempuan bercadar untuk ikut berpartisipasi aktif demi menghilangkan diskriminasi gender yang harus diperjuangkan dan harus diubah oleh perempuan Iran baik dari seluruh lapisan yang ada di masyarakat (Sadeghi, 2010).

Akibat dari perkembangan politik yang terjadi, banyak masyarakat dari berbagai kalangan ikut melibatkan diri dalam aksi *Iran Green Movement*. Hal ini menunjukkan bahwa situasi politik seperti ini merupakan suatu hal yang penting untuk melawan dan bertindak. *Iran Green Movement* juga menjadi suatu kesempatan untuk masyarakat Iran sebagai ruang politik untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan yang sebelumnya tidak mereka rasakan. Kendati demikian, meski banyak

feminis islam maupun feminisi sekuler ikut serta dalam aksi protes *Iran Green Movement* identitas mereka sebagai seorang feminis tidak menjadi faktor penentu utama, akan tetapi adanya keragaman dalam Gerakan Hijau membuktikan bahwa nilai-nilai seperti religiusitas dan sekularisme pun tidak cukup untuk mewakili tuntutan kaum perempuan (Sadeghi, 2010). Oleh karena itu, mereka mulai mencari upaya-upaya yang harus dilakukan agar tujuan mereka dapat tercapai. Salah satunya dengan menggunakan *new media* sebagai alat utama agar dengan mudah dapat menarik perhatian dan empati publik secara luas.

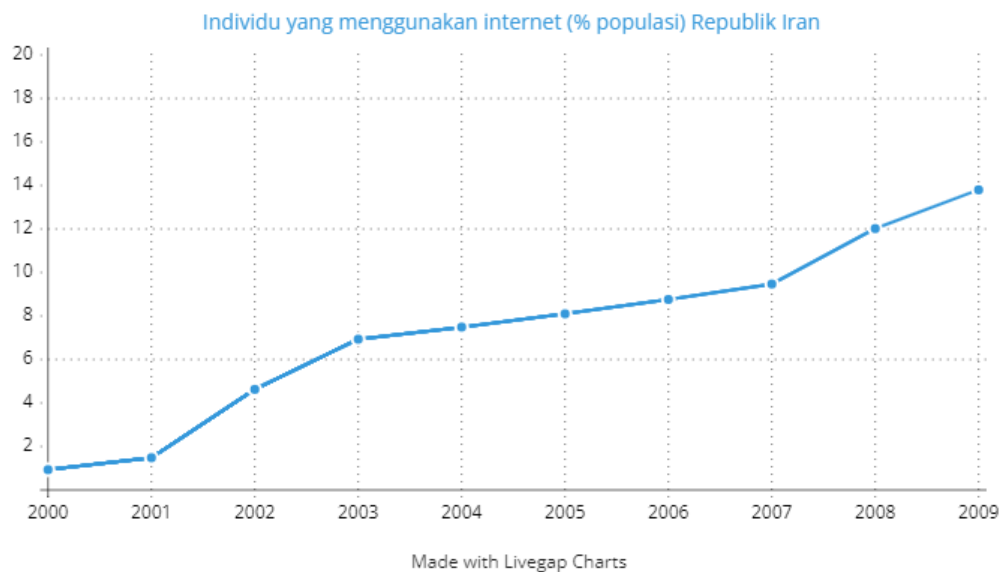
2.1.1 Perkembangan *New Media* di Iran dan Keterlibatannya dalam *Iran Green Movement*

Jaringan internet pertama kali tersambung di Iran pada tahun 1992, kemudian semakin meluas ketika munculnya “kafinet” atau Kafe Internet sehingga masyarakat ramai menggunakan akses internet untuk tersambung kedalamnya. Dampak internet pada masyarakat Iran sangat signifikan karena dapat memperlus ruang publik, salah satu buktinya adalah muncul kehadiran *Weblogistan* yang merupakan media berbasis *online* pertama yang bertujuan untuk berinteraksi secara daring (Grace, 2020).

Adanya jaringan internet di Iran, membuka jalan bagi *new media* untuk membentuk ruang informasi sehingga memudahkan masyarakat untuk berinteraksi baik secara dekat maupun jauh. Hal ini kemudian dibawa masyarakat Iran dalam aksi *Iran Green Movement* pada tahun 2009 yang mana internet merupakan akses utama dan akses paling penting untuk para demonstran. Beberapa survei menyatakan bahwa

sebelum aksi *Iran Green Movement*, sekitar tahun 2000 pengguna internet di Iran hanya sebanyak 250 ribu pengguna akan tetapi ketika terjadinya aksi protes *Iran Green Movement* pengguna internet di Iran melonjak menjadi lebih dari 23 juta pengguna yang mana lebih dari 38,3% dari 70 juta populasi masyarakatnya (Reisinezhad, 2015). Survei ini juga membuktikan bahwa lebih dari 50% dari seluruh pengguna internet di Timur Tengah merupakan masyarakat Iran dengan tingkat pertumbuhan 9% dan menduduki posisi kedua pengguna internet terbanyak di Timur Tengah setelah Israel (Reisinezhad, 2015). Untuk melihat bagaimana perkembangan internet di Iran, berikut grafik dari tahun 2000-2009.

Grafik 2.1 Grafik Pengguna Internet di Iran Tahun 2000-2009



Sumber: *International Telecommunication Union (ITU) World Telecommunication/ICT Indicators Database (Database, 2022)*

Berdasarkan data dari *International Telecommunication Union (ITU) World Telecommunication/ICT Indicators Database* yang tertera diatas, awal mula naiknya populasi pengguna internet di Iran yakni pada tahun 2001-2003 yang kala itu naik hingga 5,52% dalam kurun waktu 2 tahun. Kemudian, mulai dari tahun 2003-2007 presentase pengguna internet di Iran terus meningkat sebanyak 2,5% per tahunnya, dan peningkatan ini kian melonjak tepat pada peristiwa *Iran Green Movement* pada tahun 2009 yang mana mencapai hingga 14%.

Perbedaan aksi ini dengan aksi pada tahun 1979 ialah adanya peran *new media* tepatnya media sosial seperti YouTube, Web, Twitter, dan Facebook yang berfungsi sebagai wadah utama untuk menyebarluaskan informasi dan pembentukan organisasi dalam demonstrasi sehingga terbentuklah ruang publik yang berguna untuk memobilisasi massa hingga meraup dukungan secara luas dari berbagai penjuru dunia. Terlepas dari kontrol pemerintah, masyarakat Iran berbondong-bondong mempublikasikan ke media sosial hampir segala aktivitas yang terjadi di Iran selama aksi *Iran Green Movement* berlangsung. Selama 2009-2011 tingkat partisipasi Iran dalam dunia digital tampak berkembang pesat saat dibandingkan dengan media massa lain yang dikontrol secara ideologis oleh pemerintah (Ansari, 2012).

Media domestik seperti televisi nasional, radio, dan surat kabar yang beredar saat keberlangsungan *Iran Green Movement* sempat diberhentikan oleh pemerintah Iran agar para demonstran tidak menyebarluaskan realita yang terjadi di lapangan kepada khalayak luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun dengan

adanya kemajuan teknologi, sehingga mengunggah berita, video, dan foto ke media sosial selama aksi *Iran Green Movement* mendorong publik untuk semakin memfokuskan perhatiannya kepada aksi tersebut. Bahkan dari hal tersebut pemerintah negara-negara kawasan Timur Tengah tidak memperbolehkan masyarakat terhubung dengan internet untuk mengakses media sosial dikarenakan media sosial diklaim mempunyai peran yang sangat kuat terhadap revolusi sebuah pemerintahan. Salah satu penulis yaitu Clay Shirky berargumen bahwa

“media sosial saat ini telah menjadi sebuah sistem pada hampir semua gerakan politik dunia yang mana para pemerintah otoriter pun bahkan mencoba untuk membatasi aksesnya” (Trottier & Fuchs, 2015)

Meskipun pemerintah Iran memberlakukan sensor dan penyaringan pada jaringan internet secara intensif, akan tetapi masyarakat Iran berusaha keras untuk menggunakan jenis server *proxy* dan VPN agar dapat mengembalikan sensor dan akses ke internet terutama pada media sosial seperti Facebook, Web, Twitter, dan Youtube. Usaha masyarakat Iran tidak sampai disitu, mereka bahkan juga membeli *High Speed Internet (ADSL)*, karena terkadang untuk mengakses ke *platform* media sosial tersebut dengan *Dial Up* Internet sulit untuk diakses

Eksistensi media sosial dalam aksi *Iran Green Movement* menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap keefektivitasan *new media* pada aksi Gerakan Hijau. Menurut Amin Ansari (2012) dalam artikelnya yang berjudul *Green's Art: New Media Aesthetics in Pre-And-Post-Election Events in Iran* respon masyarakat terhadap peran

media sosial dalam *Iran Green Movement* 2009 terbagi menjadi 3 kelompok, pertama, masyarakat yang mempercayai bahwasannya media sosial seperti Twitter dan Facebook memainkan peran yang massif dan kuat dalam memobilisasi para demonstran *Iran Green Movement* baik di domestik maupun diluar domestik sehingga aksi protes ini berhasil menjalar ke seluruh penjuru dunia. Kedua, kelompok masyarakat yang menganggap bahwa keefektivitasan media sosial tidak terlalu efektif. Mereka percaya bahwa dibalik ini ada peran maupun kontrol pemerintah dalam bentuk militer maupun dunia maya. Ketiga, dalam proses politik beberapa masyarakat percaya bahwa peran *new media* sebenarnya bersifat bertentangan yang mana memiliki peran positif maupun negatif (Ansari, 2012). Meskipun adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap peran *new media* dalam aksi *Iran Green Movement*, *new media* tetap menjadi alat perantara utama bagi demonstran untuk terkoneksi dengan massa lainnya baik di domestik maupun di luar domestik.

Selain itu, *new media* juga menjadi wadah utama untuk meraup empati dan dukungan secara luas agar orang-orang juga ikut terlibat meskipun tidak terjun langsung ke lapangan. Dalam aksi protes ini juga menimbulkan beberapa aspek yang dinilai luarbiasa, yakni adanya kemampuan aktivis maupun masyarakat dari berbagai kalangan yang mampu menggunakan teknologi digital secara efisien dan suatu fakta juga bahwasannya mereka dapat dikatakan berhasil menjadi audiens dan produsen dari *new media* (Ansari, 2012). Banyak yang mengaku dan setuju bahwa dengan

adanya unggahan dari para demonstran tersebut mendorong mereka untuk lebih insentif untuk berpartisipasi dalam *Iran Green Movement*.

Eksistensi dari ruang virtual membuktikan bahwa masyarakat menaruh simpati yang besar terhadap aksi *Iran Green Movement*. Selain itu, Masyarakat bahkan menunggu unggahan terbaru dari para demonstran maupun aktivis mengenai sesuatu yang terjadi di lapangan pada lokasi dan waktu tertentu (Manso & Manso, 2013). Unggahan yang tersebar di media sosial mendorong empati dan simpati masyarakat, karena mereka dapat memahami bagaimana kerusakan aksi Gerakan Hijau sehingga hal ini memicu mereka untuk mendukung bahkan terlibat langsung dalam aksi tersebut. Berangkat dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa eksistensi media merupakan kunci utama yang paling vital demi berjalannya aksi protes *Iran Green Movement*.

2.2 Revolusi Kebijakan dan Kedudukan Perempuan di Iran

Revolusi Prancis pada tahun 1789 membawa perubahan mendasar bagi Prancis maupun negara lain mengenai ide terhadap struktur pemerintahan yang demokratis kepada dunia termasuk Iran. Sekitar tahun 1850-an mulai muncul diskusi seputar modernitas di Iran yang mana diskusi tersebut berkembang menjadi sebuah gerakan yang disebut dengan *Tajadod* atau *Renewal Movement* (Seddighi, 2009). Gerakan Pembaruan ini membahas mengenai tradisi masyarakat Iran dalam berbagai tingkatan sehingga hal tersebut membuat para ulama gelisah terhadap seberapa kuat pengaruhnya pada masyarakat Iran. Namun pada akhirnya, para ulama mulai ikut

serta dalam diskusi mengenai isu-isu politik. *Renewal Movement* ini juga mendorong untuk membatasi kekuasaan Shah/Raja melalui pengenalan sistem parlementer. Hal ini diklaim berdampak pada kedudukan perempuan, banyak yang percaya pada periode ini beberapa perempuan mulai menentang supremasi laki-laki. Contohnya, pada tahun 1896 seorang perempuan bernama Bibi Khanum yang melakukan pemberontakan mengenai lingkungan sosial dan keluarganya yang terdegradasi dengan cara meninggalkan Syiah demi kepercayaan *Babism* (Moghissi, 1994).

Setiap tahun ke tahun kedudukan perempuan di Iran selalu mengikuti dinamika perubahan berdasarkan gaya pemerintahan pada pemimpinnya. Setiap pemimpin memiliki perbedaan dalam mencetuskan sebuah kebijakan terlebih lagi pada kebijakan perempuan, yang mana hal ini menarik reaksi pro dan kontra dari masyarakat Iran sendiri. Namun sebagian besar dari kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah, banyak masyarakat terutama kaum perempuan menganggap bahwa terdapat kebijakan diskriminasi dan ketidaksetaraan antar perempuan dengan laki-laki, yang membuat banyak perempuan di Iran menderita karena merasa kehidupan mereka menjadi tidak berharga dibandingkan dengan kehidupan laki-laki (Greenblatt, 2020).

Kendati demikian, semakin berkembangnya zaman menyebabkan stigma tentang kedudukan perempuan di Iran semakin berubah-ubah. Meskipun para perempuan terus berusaha untuk meningkatkan statusnya dengan cara memahami lingkungan tempat mereka tinggal serta bagaimana cara mendapatkan hak maupun kemampuan untuk ikut serta dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungannya,

ditambah lagi dengan gaya kepemimpinan Iran yang terstruktur dan kurangnya kebebasan, namun perempuan Iran telah berjuang untuk membawa perubahan dalam masyarakat luas (Ahmadi Khorasani, 2009). Hal ini dapat dilihat dari munculnya banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan Iran demi keluar dari belenggu stigma yang menahan perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak perempuan sebagaimana mestinya.

2.2.1 Kebijakan dan Kedudukan Perempuan Pada Zaman Dinasti Shah

Pada zaman Dinasti Shah atau pada abad ke-19, kedudukan perempuan di Iran dianggap mengalami kemajuan. Iran diklaim telah melewati proses industrialisasi yang cepat maka dari itu undang-undang mengenai perempuan pun juga ikut terintegrasi. Hal ini dapat dilihat dari reformasi hukum terkait undang-undang yang diklaim ramah perempuan serta berdirinya sekolah-sekolah untuk anak perempuan. Meskipun terdapat beberapa dampak positif dari kebijakan tersebut, namun nyatanya banyak klaim yang berspekulasi bahwa kebijakan ini tidak terlalu berdampak terhadap perspektif dan peran gender.

Selain itu, banyak perempuan di Iran merasa kebijakan ini tidak aman dikarenakan adanya kesenjangan antara nilai-nilai dalam keluarga dan kebijakan gender di Iran secara luas. Undang-Undang Perlindungan Keluarga yang dicetuskan oleh Dinasti Shah Pahlevi dibuat berdasarkan hukum syariah Islam dan Al-Qur'an yang sebagaimana telah ditafsirkan dan diimplementasikan selama bertahun-tahun. Kendati demikian, undang-undang tersebut menimbulkan kesalahpahaman karena

banyak yang berasumsi bahwasannya undang-undang tersebut dibuat berdasarkan sistem hukum kuno dan asumsi-asumsi syariah yang terlalu fundamentalisme serta tidak pantas untuk diterapkan lagi pada abad ini. Awalnya beberapa isi Undang-Undang Perlindungan Keluarga yang dicetuskan oleh Shah Pahlevi masih dapat ditolerir, adapun isinya yakni, Usia minimum yang sah untuk menikah pada laki-laki 20 tahun sedangkan pada perempuan minimum 18 tahun¹; Mengharuskan laki-laki untuk memproses perceraian melalui pengadilan daripada mengumumkannya di depan dua orang saksi²; Menjelaskan alasan mengapa perempuan dapat meminta cerai secara rinci³; Suami harus mendapatkan persetujuan dari istri untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya⁴; Adanya jaminan perceraian apabila istri tidak mampu memberi keturunan atau mandul dan memperbolehkan suaminya untuk melakukan pernikahan lagi⁵; Memberikan hak kepada perempuan yang diceraikan untuk mencari hak asuh atas anak-anak mereka, yang mana sebelumnya secara otomatis diberikan kepada ayah dari anak laki-laki di atas usia dua tahun dan anak perempuan di atas usia tujuh tahun⁶ (Higgins, 1985).

Akan tetapi, tak lama setelah itu Undang-Undang Perlindungan Keluarga tersebut direvisi menjadi, Usia minimum yang sah untuk menikah bagi perempuan diturunkan menjadi 13 tahun⁷; Perceraian boleh dilakukan atas permintaan laki-laki

¹ Iranian Civil Code, Article 1401

² The Family Protection Law 1967, Article 11

³ The Family Protection Law 1967, Article 11

⁴ The Family Protection Law 1967, Article 14

⁵ The Family Protection Law 1967, Article 11

⁶ Marriage Law, Article 4

⁷ Iranian Civil Code, Article 1401

sedangkan perempuan diperbolehkan dalam keadaan tertentu⁸ Poligami dinyatakan sah tanpa persetujuan istri pertama⁹; Laki-laki masih memerlukan persetujuan pengadilan untuk menikah yang kedua kalinya, dan istri pertamanya harus bersaksi mengenai kemampuan fisik dan finansial suami untuk menghidupi pasangan lain (asalkan istri pertama tidak mandul atau lumpuh)¹⁰; Perempuan masih dapat mengajukan petisi ke pengadilan untuk perceraian dengan alasan suaminya tidak mendukung, desersi, atau adanya perlakuan buruk¹¹; Mekanisme utama pada perempuan untuk melindungi hak-haknya dalam pernikahan, dengan cara memasukkan (atau meminta walinya untuk memasukkan) klausa yang menentukan kondisi perceraian ke dalam kontrak pernikahan yang dibuat khusus untuk pasangannya. Dengan demikian, seorang perempuan dapat mengamankan haknya untuk bercerai apabila suaminya menikah lagi atau jika dia melanggar persyaratan lain yang ditentukan dalam kontrak individual¹² (Higgins, 1985)

Selain itu, sesuai dengan isi dari undang-undang tersebut mengenai hubungan seksual perempuan juga memiliki tugas untuk melayani suaminya, melahirkan, serta membesarkan anak. Namun, ketika perempuan dalam kondisi tersebut suami masih diperbolehkan untuk menikah lagi sedangkan dilain sisi perempuan tidak dapat menikah dengan lebih dari satu laki-laki. Adanya perubahan dalam undang-undang tersebut membuat banyak masyarakat Iran terlebih lagi perempuan memprotes

⁸ The Family Protection Law 1967, Article 11

⁹ The Family Protection Law 1967, Article 11

¹⁰ The Family Protection Law 1967, Article 14

¹¹ The Family Protection Law 1967, Article 11

¹² Marriage Law, Article 4

undang-undang yang dianggap diskriminasi bagi kaum perempuan, karena mereka percaya bahwa undang-undang tersebut akan mempengaruhi tingkat ketergantungan perempuan pada laki-laki, poligami, perceraian, dan terhambatnya kebebasan perempuan untuk berekspresi.

Hidup dibawah undang-undang yang tidak adil tersebut juga menimbulkan dampak yang cukup tragis terhadap perempuan Iran karena laki-laki dapat bertindak semaunya. Akibat hal ini, hampir rumah tangga tiap keluarga di Iran tidak harmonis sehingga dalam keluarga tidak lagi mendapatkan kasih sayang seutuhnya. Salah satu dampak yang cukup tragis yakni munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang kerap terjadi, namun ketika dibawa ke ranah hukum permasalahan tersebut akan ditutupi oleh undang-undang yang berpihak pada laki-laki.

Terdapat sebuah studi yang mencatat bahwa sebanyak 52,7% perempuan Iran mengalami kekerasan fisik selama pernikahan mereka, seperti ditampar, ditendang, ditinju atau dipukul dengan benda-benda (Ahmadi Khorasani, 2009). Hasil studi lain juga menunjukkan bahwa sebanyak 27,7% perempuan juga percaya bahwa mereka menghadapi hambatan terhadap perkembangan sosial, intelektual, dan pendidikan. Hambatan yang mereka laporkan yakni seperti pembatasan hubungan keluarga dan sosial, larangan untuk bekerja, larangan melanjutkan pendidikan, dan kurangnya kebebasan untuk bergabung dengan asosiasi sosial (Ahmadi Khorasani, 2009).

Selama periode Dinasti Shah Pahlevi, gerakan perempuan Iran bertransformasi dari independen menjadi ketergantungan terhadap dukungan pemerintah. Akan tetapi, rencana modernisasi Shah dan pengaruh politik asing

mendorong masyarakat Iran terutama para aktivis perempuan untuk mencari identitas baru.

2.2.2 Kebijakan dan Kedudukan Perempuan Pada Zaman Ayatullah Khomeini dan Sayyid Muhammad Khatami

Pasca Revolusi 1979 ketika sistem pemerintahan Iran bertransformasi dari monarki menjadi republik tentunya menimbulkan dampak dan mendorong perubahan dalam gerakan sosial. Menurut Moghissi (1994) dalam era revolusioner, perempuan di Iran terbagi dalam 3 kategori, pertama, perempuan yang bekerja di pinggiran kota. Perempuan pada kategori ini merupakan perempuan yang individualis dan biasanya tidak tertarik pada ideology Islam. Kedua, perempuan yang sering ikut turun dalam aksi protes/demo, biasanya perempuan pada kategori ini menggunakan cadar dan menaruh dukungan penuh terhadap ulama. Selain itu, kategori ini menjunjung keyakinan bahwa pembagian kerja dan peran pada gender perlu dibedakan demi keharmonisan dalam sosial. Ketiga, perempuan modern yang hidupnya terbentuk karena perkembangan ekonomi. Perempuan pada kategori ini berkisar dari kecenderungan nasionalis atau sosialis sekuler hingga keyakinan agama (Moghissi, 1994)

Dengan adanya perubahan tersebut, membuka peluang bagi kaum perempuan Iran untuk ikut mengambil andil dalam beberapa aspek yang ada, terlebih lagi kesempatan ini semakin massif pasca Revolusi 1979. Namun, kurang dari 2 bulan pasca revolusioner, ribuan perempuan Iran kembali turun ke jalan untuk memprotes

kebijakan Ayatullah Khomeini mengenai penggunaan wajib hijab bagi perempuan. Di lain sisi, isu cadar juga menjadi katalisator yang mendorong aksi protes tersebut karena mereka merasa khawatir akan adanya pengucilan perempuan dalam aspek militer, peradilan, dan rencana pemerintah untuk kembali meninjau Undang-Undang Perlindungan Keluarga dari pemerintah Dinasti Shah Pahlevi sebelumnya. Aksi protes ini terus berlanjut dalam beberapa hari kedepan dan selama aksi protes berlangsung kelompok Islam radikal menyerang demonstran perempuan dengan slogan-slogan kasar maupun serangan fisik.

Ketika terpilihnya Sayyid Mohammad Khatami sebagai presiden Iran pada tahun 1997, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan kesempatan untuk melawan proses ataupun kebijakan depolitisasi terkait isu-isu mengenai perempuan pasca perang semakin meluas. Gagasan Khatami terhadap sistem pemerintahannya diklaim mirip dengan *New Religious Thinkers* sehingga orang-orang yang pro dengan gagasan Khatami disebut dengan Reformis.

New Religious Thinkers memfokuskan pada nilai-nilai hubungan antar agama dan pemerintah, mereka juga mengkhawatirkan masa depan negara namun juga politik Islam yang dianggap sebagai alat penindasan. Akan tetapi, setelah berdirinya Republik Islam kaum fundamentalis mulai menyampingkan hak-hak perempuan berkedok dalil agama sehingga hal ini mendorong perempuan Iran berusaha keras untuk melawan hal-hal yang dirasa diskriminatif melalui berbagai gerakan untuk mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya.

Akibat dari gerakan dalam melawan diskriminasi perempuan, muncul gerakan yang dikenal dengan Feminisme Islam yang berdampak di domestik maupun di luar domestik (Sadeghi, 2010). Pada era ini, menurut Khorasani (2007) gerakan perempuan Iran mulai mencari jati diri atau identitas mereka yang sesungguhnya terkait dengan isu-isu perempuan. Setiap gerakan perempuan Iran mulai memperdalam batasan ideologis gerakan mereka dengan nama-nama seperti *Islamic feminism*, *socialist feminism*, dan *liberal feminism* (Khorasani, 2007).

Seiring berjalannya masa pemerintahan Khatami, masyarakat Iran merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah, terlebih lagi bagi kaum feminis Islam yang merasa kecewa terhadap peran kecil mereka dalam struktur kekuasaan. Sementara itu, adanya peran dari kaum Islamis konservatif yang mempengaruhi lembaga-lembaga non-demokrasi yang menggunakan kesempatan tersebut untuk meneror bahkan menangkap kelompok-kelompok oposisi, seperti jurnalis dan mahasiswa.

2.2.3 Kebijakan dan Kedudukan Perempuan Pada Zaman Mahmoud Ahmadinejad

Adanya kemunduran gerakan reformasi kala itu mengakibatkan kondisi paling diskriminatif yang dialami perempuan Iran. Kondisi ini bertepatan dengan munculnya tren feminis sekuler dan kampanye melawan kebijakan kekerasan dan praktik konservatif garis keras setelah pemilihan Presiden Ahmadinejad pada tahun 2005. Perempuan Iran telah mengidentifikasi kesulitan dengan Islamisme, feminisme, serta sekularisme yang diklaim gagal untuk menggagalkan gerakan feminis. Selang beberapa

bulan setelah masa pemerintahannya, Ahmadinejad mencetuskan kebijakannya terkait isu-isu perempuan dengan mengubah nama *Center for Women's Participation* menjadi *Center for Women and Family Affairs* (Mir-Hosseini, 2006).

Mengikuti jejak Ayatullah Khomeini dan Shah, Ahmadinejad menganggap bahwa hubungan gender merupakan kunci dari perubahan sosial. Alhasil, Ahmadinejad menentang pengaruh budaya barat di Iran. Semenjak kebijakan tersebut diberlakukan di Iran, terjadi beberapa konflik salah satunya antara polisi wanita bercadar yang menasihati perempuan yang mereka temui di jalan untuk menggunakan hijab sebagaimana mestinya.

Lambat-laun, kebijakan gender dan sosial ini menjadi semakin kacau bahkan sering terjadi perkelahian antar pasukan keamanan dengan perempuan yang berujung dalam jeruji besi. Pada tanggal Juni 2006, para aktivis perempuan turun ke jalan untuk memprotes undang-undang diskriminatif terhadap perempuan. Protes tersebut berakhir ricuh karena banyak demonstran yang dipukuli bahkan terdapat sekitar 70 orang yang ditangkap. Hanya beberapa hari setelah itu, para aktivis Iran mendirikan *The One Million Signature Campaign*. Berikut adalah logo resmi dari *The One Million Signature Campaign*, yang mana dalam logo tersebut terdapat gambar timbangan yang berarti sebuah harapan pada kesetaraan gender antar perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.2 Logo *The One Million Signature Campaign*



Sumber: *allianceofiranianwomen.org*

The One Million Signature Campaign atau Kampanye Sejuta Tanda Tangan merupakan sebuah kampanye yang menuntut perubahan perundang-undangan diskriminatif terhadap kesetaraan gender yang diprakasai oleh gerakan aktivis perempuan Iran yang berharap undang-undang tersebut dapat diselaraskan dengan standar hak asasi manusia internasional (Tahmasebi, 2013). Kampanye ini terbentuk pada tanggal 12 Juni 2006 tepat setelah adanya aksi demonstrasi Hari Solidaritas yang berakhir ricuh pada tanggal 11 Juni 2006, yang mana terjadi penindasan secara brutal oleh oknum polisi terhadap para perempuan Iran. Kampanye ini bertujuan

untuk mengumpulkan satu juta tandatangan pada petisi terhadap undang-undang diskriminatif terhadap perempuan di Iran, dengan harapan bahwa apabila terkumpulnya satu juta tandatangan sehingga dapat mendorong pemerintah Ahmadinejad untuk melakukan sebuah tindakan maupun perubahan terhadap kesenjangan hukum terkait kesetaraan gender di Iran.

Berikut kebijakan-kebijakan di masa pemerintahan Ahmadinejad yang dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan, Apabila seorang ayah tidak ingin anak perempuannya menikah maka anaknya tidak akan bisa menikah kecuali mendapatkan persetujuan dari pengadilan; Namun apabila pengadilan mengizinkan, pernikahan diperbolehkan bahkan sebelum usia 13 tahun¹³; Apabila istri ingin bercerai, maka dia akan kehilangan *mehr*-nya dan harus mendapatkan persetujuan dari suami¹⁴; *Hezanat* atau pengasuhan sehari-hari, memiliki dua arti yang berbeda, pertama menjaga anak dan yang kedua bertindak sebagai wali anak, mengelola urusan keuangan anak, memutuskan tentang sekolah, tempat tinggal, perjalanan ke luar negeri, kekuasaan pengawasan untuk kesehatan dan perawatan medis, dan sebagainya¹⁵; Suami dapat melakukan pernikahan tanpa batas, empat istri *aghdi* atau menikah permanen dan istri *sighehi* atau menikah sementara¹⁶; Perempuan mendapatkan hak kewarganegaraan yang berbeda dengan laki-laki. Kewarganegaraan pada perempuan tidak dapat menurun pada anaknya, meskipun pihak perempuan

¹³ Article 993, 1005, 1041, 1043, 1044, 1048, 1049, 1060, 1075, 1082, 1105, 1106, 1107, 1108, 1114, 1117, 1233 Civil Law; Paragraph 3, Article 18 Passport Law

¹⁴ Article 1120, 1122, 1123, 1129, 1130, 1133, 1145 and 1146 Civil Law.

¹⁵ Paragraph 1, Article 18 Passport Law; Article 1167, 1168, 1169, 1170, 1173, 1180, 1181, 1183, 1184, 1185, 1199, 1207, 1218, 1233, 1236, 1241 and 1251 Civil Law

¹⁶ Paragraph 2, Article 900 and Article 901 Civil Law

merupakan warga negara asli Iran namun kecil kemungkinan anaknya juga mengikuti kewarganegaraan pihak perempuan¹⁷; *Blood money*/uang darah, sejenis uang yang diberikan ketika seseorang melakukan kejahatan salah satunya seperti pembunuhan atau jenis uang yang dapat diterima saat menjadi korban. Dalam praktik ini, kompensasi yang diterima perempuan Iran diberdayakan setengah dari laki-laki¹⁸; Warisan, tuntutan mengenai syarat waris bagi anak laki-laki yang mendapatkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, dan syarat waris bagi istri atas meninggalnya ayah atau suami lebih dari dua kali lipat dari anak perempuan¹⁹; Laki-laki diizinkan untuk membunuh istrinya apabila istri melakukan perselingkuhan bahkan jika hal tersebut baru sebatas dugaan dan laki-laki yang membunuh tersebut bebas dari hukuman²⁰; Hak bersaksi, dalam hal ini kaum perempuan dibatasi untuk bersuara pada pembahasan seperti sodomi, homoseksualitas, maupun prostitusi. Tidak hanya sebatas itu, sebagai saksi suara perempuan hanya diakui setengah dari suara laki-laki²¹; *Rajal-esiyaasi* atau *man of politics* yang berarti perempuan tidak diperbolehkan menjabat sebagai Presiden; Perempuan wajib mengenakan pakaian yang telah ditentukan hukum ketika di publik, terlepas dari kepercayaannya; Meskipun tetap membayar asuransi yang sama dengan laki-laki, namun anak-anak mereka tidak dapat memperoleh manfaat dari dana pensiun maupun asuransi kesehatan ibunya; Rajam, hukuman untuk orang yang melakukan perzinahan.

¹⁷ Article 976, 986 and 987 Civil Law.

¹⁸ Article 294, 295, 300 and 301 Islamic Criminal Law

¹⁹ Paragraph 1, Article 899, 900, 901, 907 Civil Law

²⁰ Article 220 and 630 Islamic Criminal Law

²¹ Article 74, 75, 118, 119, 128, 137 and 171 Islamic Criminal Law; Article 230 Legal Procedure Code

Namun, hukum ini hanya berlaku untuk perempuan karena menurut hukum pria dapat melakukan pernikahan sementara/*sigheh* dalam jumlah yang tidak terbatas. Maka dari itu, laki-laki dapat mengklaim bahwa perempuan yang memiliki hubungan dengannya (asalkan masih lajang) sebagai istri sementara²² (Ahmadi Khorasani, 2009).

Oleh karena itu, para pencetus *The One Million Signature Campaign* memiliki ambisi besar untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat, mendukung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, serta berbagi pengalaman hidup perempuan Iran yang merasakan ketidakadilan karena adanya undang-undang diskriminatif. Dalam menyusun dan membentuk tujuan-tujuannya, kampanye ini menghasilkan tiga dokumen penting, yang pertama mengenai pernyataan kampanye, kedua mengenai tujuan dan strategi dari kampanye, dan ketiga dampak undang-undang terhadap kehidupan perempuan di Iran (Seddighi, 2009). Tercantum sekitar kurang lebih 68 undang-undang dalam KUH Perdata, KUHP, dan Konstitusi Republik Islam yang dituntut dalam petisi *The One Million Signature Campaign*. Tuntutan ini tidak hanya diharapkan akan cukup dalam membentuk persamaan pada hak perempuan di Iran, akan tetapi menaruh harapan besar bahwa tuntutan ini diperlukan bagi seluruh masyarakat Iran. Setelah berhasil membentuk tujuan dan strategi, gerakan ini resmi dikenalkan kepada publik pada tanggal 27 Agustus 2006 dan disaat yang bersamaan mereka juga meluncurkan situs web resmi yang diberi nama *change4equality.com*.

²² Article 83 and amendment 638 Islamic Criminal Law; Article 115 of the Constitution

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya *The One Million Signature Campaign* memiliki 3 pedoman yaitu, pertama *Statement of Campaign* yang mana para anggota akan berupaya untuk mengumpulkan tanda tangan sebanyak-banyaknya yang bertujuan untuk membuktikan kepada rezim bahwa masyarakat Iran memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap kesetaraan gender. Kedua, *The Plan of Campaign*, yang meliputi target maupun tujuan apa saja yang harus dipenuhi dari *The One Million Signature Campaign*. Ketiga, *The Impact of Law in Women Lives*, para aktivis yang terlibat akan berupaya untuk memperdalam kerjasama dengan para ahli hukum untuk menggantikan hukum atau kebijakan diskriminatif Iran dengan draft-draft hukum terbaru (Seddighi, 2009).

Tidak hanya itu, Kampanye Satu Juta Tanda Tangan juga percaya bahwa prinsip dasar seperti tidak memandang dari kelas sosial harus terus diterapkan agar dapat mendorong inklusivitas. Kemudian, terdapat satu dokumen penting yaitu "*Pengaruh Hukum terhadap Kehidupan Perempuan*" yang menjadi dasar kegiatan yang dilakukan para anggota dan mereka juga diberdayakan agar mengikuti prinsip yang ada sesuai dengan cara mereka sendiri, seperti melalui publikasi di platform *new media* ataupun melalui seni (Unknown, 2022).

Setelah adanya berita mengenai kecurangan dalam pemilihan umum Presiden pada bulan Juni 2009 mendorong perempuan Iran untuk terlibat dalam aksi protes *Iran Green Movement* karena aksi tersebut dianggap sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan suara mereka terhadap kekacauan dalam sistem pemerintahan maupun hukum diskriminatif di Iran. Melalui keterlibatan dalam aksi tersebut

masyarakat Iran tidak hanya memprotes arah yang telah diambil negara, akan tetapi mereka juga menantang kerangka dasar pemikiran, tindakan, dan dikotomi yang dielaborasi oleh negara dan kekuatan sosial termasuk gerakan perempuan (Sadeghi, 2010).